

**RENCANA WILAYAH PENGEMBANGAN  
PERTANIAN ORGANIK di KABUPATEN AGAM  
(Kasus Studi: PADI SAWAH ORGANIK)**

**RAHMAWATI**

Fakultas Pertanian UMSB ([rahmawati\\_3007@yahoo.co.id](mailto:rahmawati_3007@yahoo.co.id))

**MUHAMAD REZA**

Fakultas Pertanian UMSB ([rezamsi@yahoo.co.id](mailto:rezamsi@yahoo.co.id))

**ABSTRAK**

Banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan oleh sistem pertanian konvensional, membuat pemerintah menggalakkan kembali sistem pertanian yang berorientasi pada pertanian ramah lingkungan yaitu pertanian organik. Salah satu komoditi yang dikembangkan yaitu padi sawah organik, dimana Kabupaten Agam sampai saat ini masih memiliki lahan pertanian padi sawah organik. Permasalahannya semenjak tahun 2007 luas lahan pertanian padi sawah organik di Kabupaten Agam belum bertumbuh sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memetakan wilayah potensial pengembangan pertanian padi sawah organik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan jenis penelitian studi kasus, dimana data yang paling utama digunakan adalah data sekunder, sedangkan data primer digunakan untuk memperkuat hasil penelitian. Metode analisa data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan menggunakan bantuan alat analisis LFA. Hasil yang didapatkan bahwa wilayah potensial untuk pengembangan pertanian padi sawah organik adalah di Kecamatan Baso, tepatnya di empat nagari yaitu Nagari Koto Tinggi, Nagari Padang Tarok, Nagari Simarasok, Nagari Tabek Panjang.

*Keywords: pengembangan, organik, padi sawah,*

**PENDAHULUAN**

Pertanian organik lahir dengan mengusung konsep usaha tani yang dapat melestarikan lingkungan dan dapat membantu pembangunan pertanian (Mayrowani, 2012). Konsep pertanian organik, merupakan jawaban dari dampak negatif revolusi hijau yang diusung oleh negara maju dan Negara berkembang, dimana di Indonesia penerapannya dimulai pada tahun 1960-an untuk percepatan peningkatan produktivitas pertanian, terutama pada komoditi padi (Syam, 2008). Menurut Gliessmann (2007) dampak samping pertanian konvensional meliputi:

1. Degradasi dan Penurunan Kesuburan Tanah.
2. Penggunaan Air Berkelebihan dan Kerusakan Sistem Hidrologi.
3. Pencemaran Lingkungan berupa kandungan bahan berbahaya di lingkungan dan makanan.
4. Ketergantungan petani pada Input-input Eksternal.
5. Kehilangan Diversitas Genetik seperti berbagai jenis tanaman dan varietas tanaman pangan lokal/tradisional.
6. Peningkatan kesenjangan Global antara negara-negara industri dan negara-negara berkembang.
7. Kehilangan Pengendalian Komunitas Lokal terhadap Produksi Pertanian

Pada sistem pertanian konvensional, petani menjadikan pupuk kimia sebagai salah satu input utama untuk membantu peningkatan produksi usaha taninya. Pemakaian pupuk kimia secara berlebihan dapat menyebabkan residu yang berasal dari zat pembawa (*carier*) pupuk nitrogen tertinggal dalam tanah sehingga akan menurunkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian. Pupuk kimia yang terus menerus menyebabkan ekosistem biologi tanah menjadi tidak seimbang, sehingga tujuan pemupukan untuk mencukupkan unsur hara di dalam tanah tidak tercapai. Potensi genetik tanaman pun tidak dapat dicapai mendekati maksimal (Astingrum, 2005; Sutanto, 2006).

Kembali digalakkannya sistem pertanian organik di Indonesia, semenjak pemerintah mengeluarkan kebijakan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) pada tahun 2005. Dalam konteks RPPK tersebut, aspek pelestarian lingkungan menjadi isu yang sangat penting di sektor pertanian. Hal ini berkaitan dengan keamanan pangan dan kelestarian sumber daya alam, serta lingkungan pertanian. Pentingnya isu pelestarian lingkungan pertanian, dikarenakan lahan pertanian di Indonesia telah mengalami degradasi atau kerusakan, akibatnya masyarakat yang tinggal di kawasan degradasi tersebut menghadapi berbagai ancaman, seperti menurunnya produktivitas usaha tani dan munculnya berbagai penyakit (Las, Subagyo, dan Setiyanto, 2006).

Salah satu komoditi pertanian tanaman pangan yang dikembangkan dengan sistem pertanian organik adalah padi sawah organik. Dimana cara bertanam padi organik, menggunakan pupuk organik seperti kompos, pupuk kandang, atau sisa tanaman jerami yang ditanam di tanah. Sedangkan untuk mengendalikan hama, penyakit dan gulma, dilakukan secara manual atau menggunakan *biopeptisida* (Zahrah, 2011). Budidaya padi secara organik akan menghasilkan padi yang bebas residu pestisida dan pupuk kimia. Selain ramah lingkungan, biaya pertanaman sangat rendah karena pupuk dan pestisida yang digunakan berasal dari alam di sekitar petani (B P P S D M P, 2011).

Permasalahannya adalah sampai saat sekarang ini, luas lahan pertanian padi sawah organik di Indonesia (SPOI, 2011 dalam Mayrowani, 2012) dan khususnya di Sumatera Barat belum berkembang sesuai dengan harapan. Petani masih memilih sistem pertanian konvensional dalam menjalankan usahatani padi sawahnya. Pada hal, lahan pertanian di Sumatera Barat telah mengalami degradasi, sekitar 205 ribu Ha dari total 1.024.522 Ha lahan pertanian di Sumbar mulai terdegradasi dan mengalami penurunan zat hara karena kesalahan pengelolaan dan pemakaian bahan kimia berlebihan (Rusman, 2004). Irsal Las & dkk (2006) dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya lahan Pertanian, pernah mengkaji bahwa penggunaan pupuk yang berlebihan terutama pupuk nitrogen, peptisida dan sisa bahan kimia dari industri merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan di lahan sawah beririgasi.

Salah satu wilayah di Sumbar sebagai tempat pengembangan padi sawah organik adalah Kabupaten Agam (Atman dan Nurnayeti, 2013) yang memiliki topografi dataran tinggi, iklim yang sejuk, curah hujan yang banyak, dimana kabupaten ini memiliki luas wilayah 2 232.30 Km<sup>2</sup> (BPS Kab. Agam 2015). Namun, sampai saat sekarang ini luas lahan pertanian padi sawah organik belum bertambah sesuai dengan harapan. Pada kenyataannya, untuk melakukan pengembangan, dibutuhkan perencanaan yang matang dari segala aspek. Salah satu aspek yang perlu direncanakan adalah pemilihan wilayah pengembangan yang potensial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memetakan wilayah potensial pengembangan pertanian padi sawah organik.

## KAJIAN LITERATUR

### *Padi Sawah Organik*

Padi organik adalah padi yang disahkan oleh sebuah badan independen, untuk ditanam dan diolah menurut standar organik yang ditetapkan. Walau ada satu definisi pun untuk organik, kebanyakan definisi memiliki elemen umum. Misalnya, organik sebagaimana digunakan pada tanaman sawah, pada umumnya berarti (Anonimous. 2008):

- Tidak ada pestisida dan pupuk dari bahan kimia sintetis atau buatan yang telah digunakan.
- Kesuburan tanah dipelihara melalui proses “alami” seperti penanaman tumbuhan penutup dan/atau penggunaan pupuk kandang yang dikomposkan dan limbah tumbuhan.
- Tanaman dirotasikan di sawah untuk menghindari penanaman tanaman yang sama dari tahun ke tahun di sawah yang sama.

- Pergantian bentuk-bentuk bukan-kimia, misalnya pengendalian hama dan gulma digunakan serangga yang bermanfaat untuk memangsa hama serta daun jerami setengah busuk untuk menekan gulma, juga organisme lain untuk menekan serangan penyakit.

Usahatani Padi organik adalah usaha penerapan budidaya Padi secara organik dengan pengkoordinasian faktor-faktor produksi dan sumber daya yang dimiliki petani Padi organik untuk mencapai hasil produksi dan keuntungan maksimal. Usahatani Padi organik dan anorganik pada saat ini memiliki sifat sama, yaitu mengarah kepada *commercial farming*, dimana keuntungan menjadi orientasinya (Swandi, 2005). Bertanam padi secara organik pada dasarnya tidak berbeda dengan bertanam padi pada pelaksanaan intensifikasi yang dilakukan petani. Perbedaannya hanya pada pemilihan varietas, penggunaan pupuk dan pestisida.

### ***Perencanaan Sebagai Alat Pelancar Pencapaian Tujuan Pembangunan Pertanian***

Mengacu kepada pendapat A.T. Mosher (1966), perencanaan pembangunan pertanian merupakan salah satu syarat pelancar untuk mencapai tujuan dari pembangunan pertanian. Syarat pelancar yang dimaksudkan adalah perencanaan menjadi sesuatu alat yang dibutuhkan untuk memudahkan dalam mencapai tujuan pembangunan pertanian. Meskipun sebenarnya perencanaan bukanlah satu-satunya syarat mutlak dalam memudahkan pencapaian tujuan pembangunan tersebut, masih ada empat syarat pelancar lainnya yang dibutuhkan, seperti: pendidikan pembangunan, kredit, kelompok, dan perbaikan/perluasan lahan pertanian. Namun, perencanaan pembangunan pertanian sampai saat sekarang ini masih menjadi primadona oleh pemerintah sebagai syarat pelancar yang tidak pernah ditinggalkan dalam proses pembangunan pertanian di Indonesia.

Perencanaan merupakan alat yang digunakan untuk menentukan pilihan terbaik, memanfaatkan sumber daya, menetapkan tujuan dan untuk menyusun skenario-skenario dimasa yang akan datang, tentunya melalui proses yang berkelanjutan. Dalam proses perencanaan pembangunan yang berkelanjutan tersebut, terdapat beberapa unsur sebagai berikut: sebagai dasar pelaksanaan, kontinuitas dan fleksibilitas, operasional, keserasiaan antara perencanaan dan pelaksanaan, adanya evaluasi (Conyer & Hill, 1984; Tjokroamidjojo, B, 1985; Kay and Alder, 1999; Sjafrizal, 2009; Tarigan, 2004). Begitu juga dalam konteks pembangunan pertanian, perencanaan menjadi alat yang dapat digunakan oleh *stakeholder* pembangunan untuk membantunya mencapai tujuan dengan baik secara terus menerus. Terbukti disetiap periode pemerintahan yang ada di negeri ini, kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian selalu mengacu kepada perencanaan yang telah disusun oleh pemerintah.

Terdapat lima dasar pengklasifikasian rencana-rencana, diantaranya adalah berdasarkan bidang fungsional, tingkatan organisasional, berdasarkan sifat rencana, berdasarkan waktu (rencana jangka pendek, menengah, panjang), dan berdasarkan unsur-unsur rencana (dalam wujud anggaran, program, prosedur, kebijaksanaan dan lain sebagainya). Sedangkan berdasarkan tipe utama perencanaan terbagi menjadi dua, yaitu rencana-rencana strategik (*strategic plans*) dan rencana-rencana operasional (*operatuional plans*). Rencana-rencana operasional ini juga terbagilagi menjadi dua yaitu rencana sekali pakai (*single use plan*) dan rencana tetap (*standing plans*) (Handoko, 2012).

Perencanaan pada umumnya dilaksanakan dengan berbagai kombinasi pendekatan-pendekatan. Berdasarkan basis ( pijakan) utamanya, terdiri dari lima pendekatan diantaranya adalah berbasis kecendrungan (pendekatan ini tidak cocok untuk kepentingan publik secara jangka panjang), berbasis kesempatan/peluang, berbasis isu atau masalah yang ada, berbasis tujuan dan berbasis visi (Becker and Kelly, 2000). Sedangkan berdasarkan prosesnya, perencanaan dapat dibedakan menjadi perencanaan internal, perencanaan adaptif, perencanaan rasional, perencanaan partisipatif/konsensus dan perencanaan rasional-partisipatif (Rustiadi & dkk, 2011).

Selanjutnya menurut Tarigan (2004) di Indonesia juga dikenal jenis: *Pertama, topdown and bottom-up planning*. Perbedaan perencanaan jenis ini didasarkan atas kewenangan dari institusi yang terlibat. Perencanaan *model top-down* dan *bottom-up* hanya berlaku apabila terdapat beberapa tingkat atau lapisan pemerintahan. Perencanaan *model top-down* adalah apabila kewenangan utama dalam perencanaan itu berada pada institusi yang lebih tinggi di mana institusi perencana pada level yang lebih rendah harus menerima rencana atau arahan dari institusi yang lebih tinggi. Rencana dari institusi yang lebih tinggi tersebut harus dijadikan bagian rencana institusi yang lebih rendah. Umumnya terjadi adalah kombinasi antara kedua model tersebut. Akan tetapi dari rencana yang dihasilkan oleh kedua level institusi perencanaan tersebut, dapat ditentukan model mana yang lebih dominan. Apabila yang dominan adalah *top-down* maka perencanaan itu disebut sentralistik, sedangkan apabila yang dominan adalah *bottom-up* maka perencanaan itu disebut desentralistik.

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu dengan memanfaatkan paradigma *post-positivism* (kualitatif). Dari segi jenisnya penelitian ini merupakan penelitian studi kasus. Penelitian dilaksanakan selama 1 bulan yang berlokasi penelitian di Kecamatan Baso Kabupaten Agam, karena hanya wilayah ini yang difokuskan pemerintah untuk pertanian padi sawah organik. Data sekunder dikumpulkan dengan metode dokumentasi dan data primer dikumpulkan dengan metode FGD. Informan yang digunakan sebanyak 4 orang yang berasal dari Dinas Pertanian Kab. Agam, penyuluh pertanian, aparatur pemerintah Kecamatan Baso dan Aparatur pemerintah Nagari Simarasok. Teknik analisa data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan menggunakan bantuan alat analisis LFA (Sugiyono, 2008; Wirartha, 2006;).

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### ***Pemetaan Wilayah Pengembangan Pertanian Padi Sawah Organik Tingkat Kecamatan di Kabupaten Agam.***

Untuk memetakan wilayah potensial pengembangan pertanian padi sawah organik, dilakukan dengan cara melihat potensi pendukung yang dimiliki oleh daerah tersebut. Wilayah akan dipilih dalam dua tahapan, yaitu wilayah pada tingkat administratif Kecamatan dan wilayah pada tingkat administratif Nagari. Adapun pertimbangan pemilihan wilayah yang digunakan adalah dukungan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, teknologi pendukung, dan pasar untuk pertanian padi sawah organik. Pada Tabel 1 di bawah ini, akan terlihat kondisi potensi wilayah kecamatan yang dapat dijadikan lokasi pertanian padi sawah organik.

Tabel 1. Kondisi Potensi Wilayah Yang Menjadi Lokasi Pengembangan Pertanian Padi sawah Organik Tingkat Kecamatan.

Kecamatan	Potensi Yang Menjadi Pertimbangan Pemilihan Wilayah				
	SDA Pertanian yang Dominan	SDM (petani padi sawah organik)	Sarana & Prasarana pertanian padi sawah organik)	Teknologi Pendukung (pertanian padi sawah organik)	Pasar (padi/beras organik)
[01] Tanjung Mutiara	perkebunan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

[02] Lubuk Basung	perkebunan	Tdak ada	Tdak ada	Tdak ada	Tdak ada
[03] Ampek Nagari	perkebunan dan kehutanan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
[04] Tanjung Raya	perkebunan dan kehutanan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
[05] Matur	perkebunan dan kehutanan	Tdak ada	Tdak ada	Tdak ada	Tdak ada
[06] IV Koto	perkebunan dan kehutanan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
[07] Malalak	perkebunan dan kehutanan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
[08] Banuhampu	padi Sawah dan hortikultura	Tdak ada	Tdak ada	Tdak ada	Tdak ada
[09] Sungai Pua	padi Sawah dan hortikultura	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
[10] Ampek Angkek	padi Sawah dan hortikultura	Tdak ada	Tdak ada	Tdak ada	Tdak ada
[11] Canduang	padi Sawah dan hortikultura	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
[12] Baso	padi Sawah dan hortikultura	Ada	Ada	Ada	Ada
[13] Tilatang Kamang	padi Sawah dan hortikultura	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
[14] Kamang Magek	padi Sawah dan hortikultura	Tdak ada	Tdak ada	Tdak ada	Tdak ada
[15] Palembayan	perkebunan dan kehutanan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
[16] Palupuh	perkebunan dan kehutanan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Sumber : diolah dari berbagai sumber (Agam dalam Angka 2015, RTRW Kab. Agam 2010-2030, hasil FGD), 2016

Pada tabel 1 di atas terlihat bahwa dari 16 Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Agam, hanya ada satu Kecamatan yang memiliki potensi pengembangan pertanian padi sawah organik, yaitu Kecamatan Baso. Wilayah Kecamatan Baso oleh pemerintah Kabupaten Agam memang di fokuskan untuk kegiatan pertanian organik, dimana terdapat dua komoditi yang dihasilkan di daerah ini yaitu padi sawah organik dan sayur organik. Daerah ini juga telah memiliki petani padi organik, kelompok tani padi organik, serta sarana & prasarana seperti hueler padi organik, teknologi pendukung untuk pembuatan pupuk organik, pembuatan peptisida orgaik, dan juga telah memiliki pasar sendiri untuk memasarkan padi atau beras organik yang dihasilkan oleh petani. Oleh karena itu, fokus wilayah pegembangan pertanian padi sawah organik ditetapkan di Kecamatan Baso.

#### ***Pemetaan Wilayah Pengembangan Pertanian Padi Sawah Organik Tingkat Nagari/Desa di Kabupaten Agam.***

Sebelum dilakukan pemetaan wilayah pengembangan tingkat Nagari, maka perlu sedikit dijabarkan kondisi umum dari daerah Kecamatan Baso. Daerah ini memiliki luas wilayah 70,70 km, dimana Ibukecamatanannya berada di Baso. Daerah ini terbagi menjadi beberapa wilayah administratif tigak Nagari/Desa dengan jumlah 6 Nagari, dimana nagari yang memiliki luas lahan untuk sawah adalah Nagari Padag Tarok (325Ha sawah irigasi dan

145 Ha sawah tadah hujan), sedangkan Nagari yang paling sedikit lahan persawahannya adalah Nagari Koto Baru III Jorong. Pada kenyataannya, di Kecamatan Baso telah terdapat satu Nagari yang memiliki lahan persawahannya untuk pertanian padi sawah organik, yaitu Nagari Simarasok.

Pertanian padi sawah organik di Nagari Simarasok pada awalnya dipelopori oleh Hj. Nelly Hasan, beliau adalah tokoh masyarakat daerah tersebut dan juga pernah berpengalaman sebagai anggota DPR RI. Ibu Hj. Nelly menyampaikan kepada masyarakat akan manfaat dari pertanian organik, dimana beliau mengundang beberapa petani untuk mensosialisasikan kegiatan pertanian organik tersebut dan ketika itu masyarakat menerima ide pelaksanaan pertanian organik di lahan mereka. Kegiatan usaha tani padi sawah organik di nagari Simarasok dimulai pada tahun 2009 yang dilaksanakan oleh kelompok tani Lurah Sepakat. Sampai saat searang ini kelompok tani padi sawah organik di nagari ini terus bertabah, hal ini membuktikan bahwa masyarakat di Nagari Simarasok telah menyadari akan manfaat dari skstem pertanian organik.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa Kecamatan Baso terdiri dari 6 Nagari, sedangkan baru 1 Nagari yang menekuni usaha tani padi sawah organik. Sesuai dengan tujuan penelitian ini adalah memetakan wilayah potensial pengembangan pertanian padi sawah organik, maka akan diidentifikasi wilayah lainnya yang terdapat di Kecamatan Baso untuk pengembangan pertanian padi sawah organik. Pemilihan wilayah potensial tempat pengembangan pertanian padi sawah organik, dilaksanakan dengan cara mengidentifikasi dukungan atau potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah, seperti yang terdapat pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Identifikasi Wilayah Potensial Pengembangan Pertanian Padi Sawah Organik Tingakt Nagari di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam.

No	Nagari	Potensi Pendukung Pengembangan Pertanian Padi Sawah Organik				
		SDA	SDM	Sarana & Prasarana	Dukungan Pemerintah	Ketersediaan input organik (pupuk, kanduang organik tanah)
1	Koto Tinggi	Luas sawah irigasi: 203 ha Luas sawah Td.Hujan: 77 ha Tinggi mdpl : 500 - >1000 Temperatur : 20 °C – 29 °C Jumlah Sungai : 2 sungai	Jhl penduduk: 9.168 jiwa Sex ratio :98 Kepadatan penduduk: 550 jiwa/km <sup>2</sup> Putus sekolah: 2 orang	Belum ada	Tenaga penyuluh Pelatihan Sertifikasi organik Insentif	Tersedia
2	Padang Tarok	Luas sawah irigasi: 325 ha Luas sawah Td.Hujan: 145 ha Tinggi mdpl : 500 - >1000	Jhl penduduk: 5.777 jiwa Sex ratio :94 Kepadatan penduduk: 397 jiwa/km <sup>2</sup> Putus sekolah: 0 orang	Belum ada	Tenaga penyuluh Pelatihan Sertifikasi organik Insentif	Tersedia

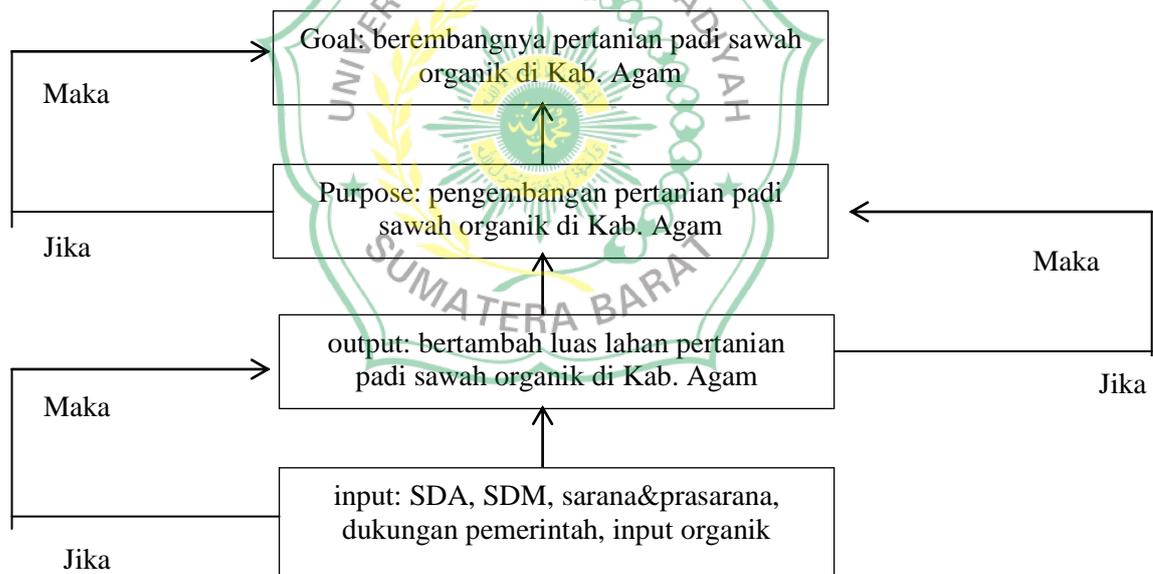
		Temperatur : $20^{\circ}\text{C} - 29^{\circ}\text{C}$ Jumlah Sungai : 2 sungai				
3	Simarasok	Luas sawah irigasi: 119 ha Luas sawah Td.Hujan: 157 ha Tinggi mdpl : 500 - >1000 Temperatur : $20^{\circ}\text{C} - 29^{\circ}\text{C}$ Jumlah Sungai : 2 sungai	Jhl penduduk: 6.840 jiwa Sex ratio :95 Kepadatan penduduk: 352 jiwa/km <sup>2</sup> Putus sekolah: 0 orang	Sudah ada	Tenaga penyuluh Pelatihan Sertifikasi organik Insentif	Tersedia
4	Tabek Panjang	Luas sawah irigasi: 252 ha Luas sawah Td.Hujan: 95 ha Tinggi mdpl : 500 - >1000 Temperatur : $20^{\circ}\text{C} - 29^{\circ}\text{C}$ Jumlah Sungai : 2 sungai	Jhl penduduk: 8.302 jiwa Sex ratio :82 Kepadatan penduduk: 543 jiwa/km <sup>2</sup> Putus sekolah: 0 orang	Belum ada	Tenaga penyuluh Pelatihan Sertifikasi organik Insentif	Tersedia
5	Salo	Luas sawah irigasi: 74 ha Luas sawah Td.Hujan: 24 ha Tinggi mdpl : 500 - >1000 Temperatur : $20^{\circ}\text{C} - 29^{\circ}\text{C}$ Jumlah Sungai : 2 sungai	Jhl penduduk: 1.502 jiwa Sex ratio :84 Kepadatan penduduk: 795 jiwa/km <sup>2</sup> Putus sekolah: 0 orang	Belum ada	Tenaga penyuluh Pelatihan Sertifikasi organik Insentif	Tersedia
6	Koto Baru III Jorong	Luas sawah irigasi: 52 ha Luas sawah Td.Hujan: 14 ha	Jhl penduduk: 1.593 jiwa Sex ratio :95 Kepadatan penduduk: 654	Belum ada	Tenaga penyuluh Pelatihan Sertifikasi organik	Tersedia

		Tinggi mdpl : 500 - >1000 Temperatur : 20 °C – 29 °C Jumlah Sungai : 2 sungai	jiwa/km <sup>2</sup> Putus sekolah: 0 orang		Insentif	
--	--	--	---	--	----------	--

Sumber: Diolah dari berbagai sumber: 2016

Untuk memilih lokasi potensial pengembangan pertanian padi sawah organik tingkat Nagari, maka digunakan metode “*Logical Framework Analisis (LFA)*”, dimana lokasi dipilih menggunakan pendekatan logika. berdasarkan potensi yang memang dimilikinya sebagai dasar pengembangan pertanian padi sawah organik. Logical Framework Analysis (LFA) adalah instrumen analisis, presentasi dan manajemen yang dapat membantu perencana untuk menganalisis situasi eksisting, membangun hirarki logika dari tujuan yang akan dicapai, mengidentifikasi resiko potensial yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan hasil, membangun cara untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tujuan (output) dan hasil (outcomes), menyajikan ringkasan aktivitas suatu kegiatan serta membantu upaya monitoring selama pelaksanaan implementasi proyek (Ausguidline, 2005).

Konsep logika yang digunakan dalam pemilihan wilayah potensial untuk pengembangan pertanian padi sawah organik adalah logika sebab akibat. Secara ringkas dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Logika Sebab Akibat Pemilihan Wilayah Pengembangan Pertanian padi Sawah Organik Tingkat Nagari Kecamatan Baso, Kabupaten Agam

Berdasarkan Gambar 1 dan didukung oleh data-data yang terdapat pada Tabel 2 di atas, maka dapat ditetapkan beberapa Nagari untuk menjadi wilayah pengembangan pertanian padi sawah organik. Dari 6 Nagari yang ada di Kecamatan Baso, maka ada 4 Nagari yang dapat dijadikan wilayah pengembangan, yaitu:

1. Nagari Koto Tinggi
2. Nagari Padang Tarok
3. Nagari Simarasok
4. Nagari Tabek Panjang

Keempat Nagari yang dipilih memiliki dukungan input yang dapat membantu kelancaran pengembangan pertanian padi sawah organik. Adapun dukungan potensial yang dimiliki keempat wilayah tersebut adalah SDA, SDM, sarana & prasarana, dukungan pemerintah, ketersediaan bahan pembuat pupuk organik, peptisida organik dan kandungan organik tanah.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pada tingkat Kecamatan, wilayah yang potensial untuk dijadikan tempat pengembangan pertanian padi sawah organik di Kabupaten Agam adalah Kecamatan Baso. Sedangkan untuk wilayah tingkat Nagari, terdapat empat nagari yang potensial untuk lokasi pengembangan pertanian padi sawah organik, yaitu: Nagari Koto Tinggi, Nagari Padang Tarok, Nagari Simarasok, Nagari Tabek Panjang.

### Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah untuk pemerintah Kabupaten Agam, supaya dapat menyediakan data-data yang terkait dengan pertanian padi sawah organik, sehingga pada saat menyusun dokumen perencanaan, para perencana tidak kesulitan dalam mengidentifikasi kondisi ekisting pertanian padi sawah organik di Kabupaten Agam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astiningrum, M. 2005. Manajemen Persampahan, Majalah Ilmiah Dinamika Universitas Tidar Magelang 15 Agustus 2005. Magelang 8 hal.
- Atman dan Nurnayeti. 2013. Bunga Rampai Pengembangan Agribisnis. Inovasi Teknologi dan Perbaikan Sistem Dalam Pengembangan Agribisnis. Penerbit Kristal Multi Media; 162-175 hlm.
- Becker, Barbara & Eric Damien, Kelly, 2000. *Community Planning, An Introduction To The Comprehensive Plan*, Washington: Island Press, 478 Hlm.
- BPPSDMP.2011. Pencanaan Gemas Organik. Diunduh pada [cybex.pertanian.go.id/gerbangdaerah/detail/3061](http://cybex.pertanian.go.id/gerbangdaerah/detail/3061) (10-04-2016).
- BPS Kab. Agam. 2015. Agam Dalam Angka 2015. Lubuk Basung.
- Conyers, Diana and Hills, Peter. 1984. *An Introduction to Development Planning in the Third World*. New York: John Willey & Sons.
- Dinas Pekerjaan Umum Kab. Agam. 2010. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam 2010-2030. Lubuk Basung.
- Dipertahornak. 2011. Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, dan peternakan Kabupaten Agam 2011-2015. Lubuk Basung.
- Gliessman, S.R. 2007. *Agroecology: The Ecology of Sustainable Food System*. Second Edition. CRC Press. New York.
- Handoko, T. Hani. 2012. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPFE.
- Irsal Las & dkk. 2006. Antisipasi Perubahan Iklim Dalam Mengamankan Produksi Beras Nasional. Jurnal Pengembangan Inovasi Pertanian, Volume 4 Nomor 1, hal 76-86
- Kay, R., dan J. Alder. 1999. *Coastal Planning and Management*. E&FN Spon. London.
- Las, Subagyo, dan Setiyanto. 2006. Isu dan Pengelolaan Lingkungan Dalam Revitalisasi Pertanian. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Volume 25, Nomor 3.
- Leeuw, F. 2001. *Assumptional Analysis, Log Frame Analysis and Other Methods of Reconstruction and Evaluating Program Logic*. , Netherlands Utrecht University dan Education Review Office of Netherlands.
- Mayrowani, H. 2012. Pengembangan Pertanian Organik di Indonesia. Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi, Volume 30 Nomor 2, hal 91-108.
- Mosher. A.T. 1966. *Getting Agriculture Moving*. New York: A Praeger, Inc. Publisher.
- Örtengen, K. 2003. *The Logical Framework Approach*, Stockholm., Swedish International Development Cooperation Agency. [www.sida.se/publications](http://www.sida.se/publications) [08-05-2005].